



STRATEGI MENGATASI PENURUNAN DAYA BELI DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI

Izzaty*)

Abstrak

Kuartal I-2015 pertumbuhan ekonomi melambat sekitar 4,71 persen. Perlambatan perekonomian yang berdampak pada penurunan daya beli dapat diatasi dengan menjamin stabilitas harga dan pasokan yang berujung pada pengendalian inflasi. Upaya lain berupa percepatan realisasi anggaran terutama infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi. Selain itu, percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagai realisasi pemberian dana stimulus pemerintah yang diarahkan untuk menambah penyerapan tenaga kerja merupakan langkah yang efektif untuk memperbaiki daya beli masyarakat.

Pendahuluan

Pada kuartal I-2015, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,71 persen, jauh lebih rendah daripada laju periode yang sama pada tahun lalu, yaitu 5,14 persen. Pencapaian ini sekaligus melanjutkan tren perlambatan sejak kuartal III-2012. Perlambatan terjadi hampir di semua sektor. Sebagai contoh, di sektor riil, perlambatan terjadi pada penjualan ritel, seperti penjualan barang-barang elektronik dan bahan bangunan yang masing-masing mengalami penurunan 30 persen. Yongky Susilo, peneliti dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), menyebutkan bahwa

pertumbuhan semua sektor riil dalam posisi tidak aman, termasuk sektor ritel.

Data BPS menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015. Terdapat indikasi pelemahan konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen utama dari pertumbuhan dengan porsi 57 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Perlambatan konsumsi rumah tangga diartikan sebagai penurunan daya beli masyarakat. Pelemahan nilai tukar rupiah akibat perlambatan ekonomi dunia ikut memberikan andil penurunan daya beli masyarakat.

*) Peneliti Muda Kebijakan Publik, pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: izzatym@yahoo.com



Pada tataran mikro, daya beli yang rendah membuat dunia usaha tidak berkembang karena lesunya penjualan. Akibatnya, pelaku usaha tidak bisa meningkatkan upah buruh dan menyerap lebih banyak tenaga kerja, bahkan pelaku usaha harus bertahan dengan melakukan rasionalisasi tenaga kerja. Di sisi lain, tanpa peningkatan pendapatan, masyarakat tidak memiliki dana lebih untuk berbelanja dan tidak mampu membeli produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Kondisi ini semakin diperparah dengan fluktuasi harga. Konsekuensinya, konsumen terpaksa harus berhemat.

Enny Sri Hartati, Direktur Indef, mengatakan, turunya pertumbuhan dunia usaha di Indonesia akibat fluktuasi harga sebagai imbas dari kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan harga gas elpiji, dan tarif dasar listrik (TDL) yang dikembalikan kepada mekanisme pasar sehingga menyulitkan dunia usaha dalam menghitung harga jual yang mengakibatkan melonjaknya harga barang. Tentu saja hal ini direspon oleh masyarakat dengan menurunkan konsumsinya. Padahal, tanpa ada perubahan kebijakan dari pemerintah saja, masyarakat akan menghadapi lonjakan inflasi yang lebih besar lagi pada bulan Juni dan Juli 2015 bersamaan dengan momentum Ramadhan dan Lebaran.

Stabilitas Pengendalian Harga dan Pasokan

Terobosan kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan pengendalian yang terukur dalam menjamin stabilitas harga bahan pokok, menjaga daya beli masyarakat, dan mengontrol inflasi dalam batas yang aman. Hal ini sangat diperlukan agar ekonomi Indonesia tidak terjebak pada kondisi stagflasi, akibat harga barang yang terus meningkat di tengah kemampuan daya beli masyarakat yang semakin menurun.

Kenaikan harga harus dikendalikan sehingga inflasi dapat terjaga apalagi setelah adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Setiap terjadi kenaikan harga BBM, maka biaya transportasi dan harga pangan melonjak. Menurut Ahmad Erani Yustika, saat pemerintah telah menetapkan harga BBM sesuai dengan pergerakan harga pasar

maka harga BBM cenderung berfluktuasi. Akibatnya, inflasi memerlukan manajemen yang lebih rumit. Dengan demikian, isunya bukan hanya pada penambahan pasokan barang saja, tetapi juga menjaga struktur pasar distribusi yang sehat.

Hal yang sama terjadi pada pengendalian harga pangan (*volatile foods*). Selain kebijakan *floor price*, *ceiling price*, dan operasi pasar, muncul wacana penerbitan dan pemberlakuan Peraturan Presiden tentang Pengendalian Harga Pangan sebagai tindak lanjut dari amanat UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Perpres tersebut mengatur pengendalian harga komoditas pangan utama, wewenang pengendalian harga, dan pengelolaan stok dan logistik. Bulog akan ditugaskan untuk mengoptimalkan penggunaan cadangan pemerintah dan atau dana komersial, dengan mengutamakan sumber pengadaan (menyerap) hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan pemerintah.

Pemerintah harus segera melakukan beberapa kebijakan, antara lain pembentukan tim stabilitas harga, pemberlakuan harga khusus dan harga subsidi saat terjadi gejolak harga, penetapan harga eceran tertinggi saat operasi pasar kebutuhan pangan utama dan komoditas penting, optimalisasi sarana distribusi dan kelancaran moda transportasi barang, pengaturan ekspor dan impor, dan kebijakan terkait lainnya.

Di sisi lain peran penting pemerintah daerah tidak dapat diabaikan. Pemerintah daerah harus dapat mengendalikan fluktuasi harga yang banyak berkontribusi terhadap inflasi daerah, khususnya harga komoditas dan tarif angkutan umum. Pengendalian harga tersebut dilakukan dengan memantau harga secara rutin dan melakukan operasi pasar sehingga apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar dapat segera menstabilkan harga tersebut.

Mengatasi Penurunan Daya Beli Melalui Belanja Pemerintah dan Stimulus Pemerintah

Tekanan pelemahan rupiah yang diikuti dengan melemahnya permintaan menunjukkan perlambatan perekonomian yang harus direspon cepat oleh pemerintah melalui kebijakan belanjanya. Belanja pemerintah akan dapat meningkatkan

kinerja sektor riil mulai kuartal II-2015 dari keterpurukan sepanjang tiga bulan awal tahun 2015. Sayangnya, hingga saat ini pemerintah sendiri belum bisa berbuat banyak guna menopang perekonomian nasional.

Realisasi penggunaan belanja negara pada kuartal I-2015 sudah mencapai Rp440 triliun atau setara dengan 22,18 persen dari total APBN 2015. Persoalan penyerapan belanja selalu menjadi persoalan klasik, yaitu penyerapan cenderung rendah dan menumpuk di akhir tahun. Lebih dari 50 persen anggaran negara baru terserap pada triwulan akhir. Rendahnya penyerapan belanja pemerintah pada kuartal pertama ini disebabkan oleh APBN-P 2015 yang baru dirampungkan pada Februari 2015 serta perubahan nomenklatur dari kementerian sehingga nomenklatur kementerian belum disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran.

Kecepatan dan ketepatan penyerapan anggaran APBN-P 2015 akan membantu perekonomian nasional untuk tetap mempunyai daya tahan dari perlambatan perekonomian global dan regional. Subsektor mulai dari jasa konstruksi, konsultan, besi dan baja, semen, produk-produk petrokimia sampai ke sektor pembiayaan dan jasa asuransi akan terdorong maju dengan adanya pengerjaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dalam negeri seperti pembangunan Tol Trans-Sumatera maupun pembangunan sejuta rumah untuk rakyat.

Percepatan pengerjaan proyek infrastruktur dengan total anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai Rp94,57 triliun yang terdiri dari proyek tahun jamak sebesar Rp9,1 triliun dan proyek tahun 2015 sebesar Rp85,47 triliun akan membantu dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Proyek infrastruktur tahun anggaran 2015, yang sudah masuk proses lelang adalah sekitar 80 persen atau Rp68,36 triliun dengan 50 persennya sudah tanda tangan kontrak. Lelang proyek akan selesai pada Mei dan pengerjaan konstruksi sudah 100 persen berjalan pada Juni 2015. Target pemerintah dalam penyelesaian infrastruktur dapat tercapai setelah selesainya revisi Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Tidak kalah pentingnya, komitmen pemerintah dan pengusaha menggunakan produk dalam negeri untuk pengerjaan proyek-proyek infrastruktur dapat meningkatkan perekonomian. Komitmen pemerintah diwujudkan melalui rencana pemberian stimulus melalui penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen bagi pelaku usaha yang membeli produk dalam negeri untuk pengerjaan proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah harus bisa mengatur agar dalam kerja sama pelaku usaha infrastruktur dengan mitra asing sedapat mungkin mengoptimalkan penggunaan produk industri Indonesia, seperti baja konstruksi, besi, beton, dan semen. Jika seluruh materialnya impor, dikhawatirkan akan mengganggu transaksi berjalan dan neraca pembayaran Indonesia.

Selain melalui belanja infrastruktur, daya beli masyarakat dapat ditingkatkan melalui pemberian stimulus kepada usaha mikro dan kecil agar bisa bertahan. Usaha mikro dan kecil mampu menyerap tenaga kerja sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat. Pemerintah harus segera menuntaskan sejumlah regulasi yang belum selesai dan bisa mengganggu perekonomian. Salah satu contohnya adalah draf Keputusan Presiden mengenai penyaluran KUR yang sampai saat ini belum keluar sehingga menghambat proses pengucuran. Sementara program pemerintah lainnya, yaitu PSKS sudah 89 persen tersalurkan dari total sekitar Rp10 triliun.

Penutup

Tren perekonomian global yang melambat dan penurunan kinerja perekonomian nasional menjadi sinyal penting sekaligus peringatan bagi pemerintah agar tidak lengah dari ancaman pelemahan ekonomi lanjutan. Indonesia harus terus menjaga kualitas pertumbuhan dengan cara memberikan dorongan yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan membantu belanja masyarakat. Konsumsi masyarakat sebagai sumber utama pertumbuhan harus menjadi prioritas nasional agar tetap tumbuh melalui daya beli yang terjaga. Pemerintah harus mengambil sejumlah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk membantu memulihkan perlambatan ini seperti percepatan

pengeluaran belanja pemerintah khususnya anggaran infrastruktur, bantuan sosial dan skema kredit untuk usaha rakyat.

Melalui percepatan pengeluaran belanja pemerintah khususnya anggaran infrastruktur akan dapat mendorong konsumsi rumah tetap tinggi. Berbagai proyek ini akan membuka lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran akibat gelombang pemutusan hubungan kerja yang mungkin terjadi di masa mendatang.

DPR RI memiliki peran penting dengan mendorong pemerintah segera menerbitkan Perpres tentang Pengendalian Harga Pangan guna menjamin stabilitas harga dan pasokan. DPR juga berperan penting dalam mengawasi penyerapan anggaran infrastruktur yang tepat sasaran dan penyerapan penyaluran kredit usaha mikro dan kecil yang berimbas pada peningkatan daya beli masyarakat dan sektor riil.

Referensi

- “Belanja Infrastruktur Digenjot”, *Bisnis Indonesia*, 6 Mei 2015.
- “Indeks Ekspektasi Konsumen Turun, Harga Naik, Optimisme Publik Turun”, *Neraca*, 8 Mei 2015.
- “Infrastruktur Mulai Bergerak”, *Kompas*, 7 Mei 2015.
- “Kandungan Domestik Digenjot”, *Kompas*, 8 Mei 2015.
- “Kegiatan Usaha Kian Melambat”, *Neraca*, 14 April 2015.
- “Menanti Aturan Nyata Pengendali Harga”, *Media Indonesia*, 7 Mei 2015.
- “Pertumbuhan Bisa di Atas 5,4 %, Akselerasi Pengeluaran Pemerintah Jadi Stimulus”, *Suara Pembaruan*, 6 Mei 2015.
- “Pemerintah Siapkan Jurus Kendalikan Harga”, *Media Indonesia*, 8 Mei 2015.
- “Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Belanja Infrastruktur Digenjot”, *Bisnis Indonesia*, 6 Mei 2015.
- “Pertumbuhan, Saatnya Berlari Cepat dengan Cara Tepat”, *Kompas*, 7 Mei 2015.
- “Presiden : Kuartal II Jadi Titik Balik”, *Bisnis Indonesia*, 7 Mei 2015.
- “Pemerintah Permudah Proses Lelang”, *Kompas*, 11 Mei 2015.
- “Turunnya Daya Beli Masyarakat : Pemerintah Diminta Respon Cepat”, *Neraca*, 8 Mei 2015.
- Yustika. Ahmad Erani. 2015. *Dinamika Perekonomian Nasional: Kebijakan Ekonomi dan Sektor Strategis Nasional*. Jakarta: CORE Indonesia.